MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

DETERMINAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA

Nabila Azzahra[1],Prayudha Ananta[2],Ida Budiarti[3],Dedy Yuliawan[4]
Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Indonesia[1234]

Azzahranabila951@gmail.com,Prayudha.ananta@feb.unila.ac.id,
ida.budiarti@feb.unila.ac.id, dedy.yuliawan@feb.unila.ac.id

Abstract

Human development is a fundamental indicator for assessing societal welfare, as it reflects not only economic performance but also key dimensions of education and health that determine overall quality of life. This study aims to examine the effects of education expenditure, inflation, and economic growth on the *Human Development Index* (HDI) in Indonesia. The study employs secondary panel data covering 31 provinces over the period 2016–2023, sourced from Statistics Indonesia (BPS) and relevant government institutions. The analytical method used is panel data regression with a *Fixed Effect Model* (FEM) approach to capture heterogeneity across provinces. The estimation results indicate that education expenditure has a negative and statistically significant effect on HDI, suggesting that increases in education budget allocations have not been fully effective in improving human development outcomes due to inefficiencies in spending allocation, the dominance of routine expenditures, and weak fiscal governance. Inflation is found to have a positive but statistically insignificant effect on HDI, implying that price fluctuations during the study period did not exert a substantial impact on human development. Meanwhile, economic growth shows a positive and significant effect on HDI at the 10 percent significance level, confirming that economic expansion continues to play an important role in enhancing human capital quality. Simultaneously, education expenditure, inflation, and economic growth significantly influence HDI. These findings underscore the importance of improving the effectiveness of public spending particularly in the education sector and implementing inclusive, equity-oriented economic growth policies to promote sustainable human development in Indonesia..

***Keywords:* *Education Expenditure*, *Inflation*, *Economic Growth*, *Human Development Index*, *Government Role*.**

Abstrak

Pembangunan manusia merupakan ukuran fundamental dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tidak hanya merefleksikan kinerja ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi

Article history
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 80
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

pendidikan dan kesehatan sebagai komponen utama kualitas hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh belanja pendidikan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Data yang digunakan berupa data panel sekunder yang mencakup 31 provinsi selama periode 2016–2023, bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementerian terkait. Metode analisis yang diterapkan adalah regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) guna menangkap perbedaan karakteristik yang bersifat spesifik antarprovinsi. Hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, yang mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi anggaran pendidikan belum sepenuhnya efektif dalam mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia, akibat adanya inefisiensi alokasi, dominasi belanja rutin, serta lemahnya tata kelola fiskal. Selanjutnya, inflasi menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM, yang mengindikasikan bahwa fluktuasi tingkat harga selama periode penelitian belum memberikan dampak yang berarti terhadap pembangunan manusia. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada tingkat signifikansi 10 persen, yang menegaskan bahwa ekspansi ekonomi tetap berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Secara simultan, belanja pendidikan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terbukti berpengaruh signifikan terhadap IPM. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan efektivitas belanja publik, khususnya pada sektor pendidikan, serta perlunya kebijakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berorientasi pada pemerataan untuk mendorong pembangunan manusia yang berkelanjutan di Indonesia.
Kata Kunci: ***Belanja Pendidikan*, *Inflasi*, *Pertumbuhan Ekonomi*, *Indeks Pembangunan Manusia*, *Peran Pemerintah***.

1. Pendahuluan

Pembangunan manusia merupakan indikator esensial dalam menilai kemujuan suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikembangkan oleh UNDP mengukur kualitas pembangunan melalui dimensi pendidikan, kesehata, dan standar hidup layak yang juga mencerminkan aspek pemerataan pendapatan. Dibandingkan indikator ekonomi, IPM memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesejahteraan masyarakat. Capaian IPM dipengeruhi oleh akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta ketersediaan infrastruktur pendukung [1], [2].

Selama periode 2020-2024, IPM Indonesia menunjukan tren peningkatan yang stabil dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 0,75 persen, naik dari 72,81 persen pada 2020 menjadi 75,02 pada 2024 [3]. Namun, secara global indonesia masih berada pada peringkat 112 dari 191 negara dan menempati posisi ke 18 dari 26 negara di Asia. Di kawasan Asia

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Tenggara capaian IPM Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand [4]. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas modal manusia tetap menjadi tantangan strategis bagi Indonesia. Disparitas juga terlihat antarwilayah di Indonesia yang mencerminkan peningkatan IPM tidak hanya menjadi permasalahan tingkat nasional namun regional. Hal ini dapat dilihat capaian IPM di wilayah DKI Jakarta (83,08) lebih tinggi dibandingkan dengan Kalimantan Timur (78,83) dan Papua (73,00). Fenomena mengindikasikan adanya kesenjangan kualitas manusia struktural, di mana wilayah dengan akses infrastruktur dan ekonomi lebih maju cenderung memiliki IPM tinggi [5]
Berdasarkan kajian [6], [7], alokasi belanja pendidikan merupakan instrumen penting dalam kebijakan publik yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan pemerataan dalam pembangunan manusia. Peningkatan alokasi belanja pendidikan dan kesehatan tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses layanan publik, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemerataan daerah [8], [9]. Sebagai investasi publik yang strategis, pengeluaran pendidikan memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan konstitusi pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menetapkan alokasi minimal 20% dari Anggaran Bendapatan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) [10].
Meskipun alokasi belanja pendidikan terus meningkat, Indonesia masih menghadapi ketimpangan antardaerah. Peningkatan anggaran belum sepenuhnya diikuti pemerataan saran dan prasarana, distribusi tenaga pendidik yang berkualitas, serta efektivitas penyerapan anggaran [11], [12]. Berdasarkan kemenkeu 2023 menunjukan bahwa realisasi anggaran pendidikan masih berada di bawah amanat konstitusi, yakni mencapai 16 persen dari total apbn pada tahun 2023. Meskipun belanja pendidikan menunjukan peningkatan secara nasional dari 550 triliun pada tahun 2021 menjadi 665 triliun pada tahun 2023 [13]. Menurut Data Programme For International Student Assessment (PISA) tahun 2022 mencatat bahwa skor literasi indonesia berada pada angka 359 poin, suatu capaian yang masih tertinggal signifikan dari rata-rata negara *Organisation for Econoomic Cooperation and Development* (OECD) sebesar 480 poin [14]. Hal ini diperkuatdengan penelitian [15], [16] yang menunjukan bahwa di Indonesia anggaran pendidikan lebih banyak terserap pada belanja rutin dan pegawai serta lemahnya tata kelola fiskal dan kelembagaan yang menyebabkan alokasi dana pendidikan tidak berdampak langsung pada peningkatan IPM. Dengan demikian, peningkatan belanja pendidikan belum sepenuhnya terkonversi menjadi perbaikan kapasitas layanan pendidikan, sehingga berbagai daerah masih mengalami disparitas dalam kualitas dan pemerataan layanan pendidikan nasional.

Selain itu, dinamika inflasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua variabel makroekonomi yang signifikan dalam mempengaruhi kualitas pembangunan manusia. Inflasi yang tinggi terbukti dapat mengikis daya beli masyarakat, membatasi akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan [17]. Menurut data BPS, (2023), Indonesia mengalami inflasi sebesar 5,51% angka tertinggi dalam kurun waktu delapan tahun yang berimbas pada menurunnya kapasitas rumah tangga dalam memenuhi dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, Data BPS 2025 menunjukan bahwa meskipun terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dari 3,69

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

persen pada tahun 2021 menjadi 5,03 pada tahun 2024, kenaikan IPM dalam periode sama hanya sebesar 0,58 poin. Fenomena ini mengindikasikan pertumbuhan yang masih ekslusif dan belum inklusif. Sejalan dengan itu, kajian [19], [20] menyatakan bahwa pertumbuhan yang tidak diiringi dengan mekanisme redistribusi pendapatan yang efektif justru berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan berdampak kontraproduktif terhadap kualitas pembangunan manusia. Oleh karena itu, dinamika inflasi dan pertumbuhan ekonomi perlu dipahami sebagai faktor yang turut menentukan efektivitas belanja publik dalam mendorong kesejahteraan dan kualitas manusia.

Meskipun berbagai kajian terdahulu telah mengkaji peran belanja publik dalam sektor pendidikan serta pengaruh faktor makroekonomi terhadap pembangunan manusia, mayoritas penelitian masih terbatas pada analisis hubungan parsial antarvariabel tersebut. Selain itu, pendekatan yang digunakan seperti regresi linier sederhana atau model random effect dinilai berpotensi mengabaikan pengaruh efek tetap antarwilayah yang bersifat konstan, seperti berupaya mengisi celah tersebut dengan model data panel *Fixed Effect Model* (FEM) guna menangkap variasi antarprovinsi sekaligus menganalisis pengaruh simultan dari belanja pendidikan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM dalam kurun waktu 2016 hingga 2023.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

2. Tinjauan Pustaka

Teori Modal Manusia (Human Capital Teori)

Teori Modal Manusia, yang digagas oleh [21], menegaskan bahwa kapasitas individu yang tercermin melalui pendidikan, keterampilan, dan kesehatan pada hakikatnya merupakan suatu bentuk investasi strategis. Investasi dalam manusia ini tidak hanya berperan dalam meningkatkan produktivitas dan potensi penghasilan individu secara berkelanjutan, tetapi juga memiliki makna yang lebih mendalam. Dalam kerangka pembangunan manusia, pendidikan dan kesehatan dengan demikian tidak hanya semata-mata sebagai knsumsi, melainkan sebagai fondasi investasi yang menghasilkan externalities positif yaitu, manfaat bagi percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan [21].
Mengacu pada teori modal manusia [21], investasi pemerintah pada pendidikan dan kesehatan meningkatkan produktivitas dan kemampuan adaptif masyarakat, sehingga belanja publik pada kedua sektor tersebut berperan sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, efektivitas belanja publik dalam mendorong kesejahteraan tidak semata-mata diukur dari besaran alokasi anggarannya, melainkan pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjamin terwujudnya pemerataan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan di seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Teori Peran Pemerintah

Menurut [22], pemerintah mempunyai tiga fungsi pokok yakni alokasi, distribusi, dan stabilisasi, efektivita belanja publik dalam mendukung pembangunan manusia tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, tetapi pada keberhasilan dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut secara integratif. Fungsi alokasi menjamin penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan telekomunikasi yang tidak dapat disediakan secara memadai oleh pasar, sementara fungsi distribusi berperan penting dalam mengurangi ketimpangan akses antardaerah guna mewujudkan keadilan sosial. Di saat yang sama, fungsi stabilisasi berperan menjaga kondisi makroekonomi melalui pengendalian inflasi dan dukungan pertumbuhan, sehingga masyarakat tetap mampu mengakses layanan dasar tersebut.

3.Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif inferensial dengan data sekunder berbentuk panel yang mencakup 31 provinsi di Indonesia selama periode 2016–2023. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berdasarkan kerangka teoritis dan empiris, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut: :

H1 : Belanja Pendidikan berpengaruh dan signifikan terhadap IPM di Indonesia
H2 : Inflasi Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia
H3 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia
H4 : Secara simultan belanja pendidikan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap IPM di Indonesia.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel, dengan model persamaan yang dituliskan sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 BPEND + \beta_2 INF + \beta_3 PE + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

IPM_{it} : Indeks Pembangunan Manusia
β_0 : Intersep

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

$\beta_{(1,2,3,4)}$: Koefisien masing-masing variabel independen
$BPEND_{it}$: Belanja Pendidikan
INF_{it} : Inflasi
PE_{it} : Pertumbuhan ekonomi
$\varepsilon_{i,t}$: Eror Term
I : Jumlah Data Cross Section
t : Jumlah Data Time Series

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 analisis deskriptif variabel

Tabel 1. Hasil Deskriptif Variabel

Variabel	Keterangan	Hasil
IPM	Std dev.	3.7013
	Skewness	-0.3033
	Kurtosis	1.3344
BPEND	Std dev.	2697004285173,30
	Skewness	2,57
	Kurtosis	7,43
	VIF	1,54
INF	Std dev.	1.4892
	Skewness	1.0927
	Kurtosis	0.72
	VIF	1.05
PE	Std dev.	1.2152
	Skewness	-0.3009
	Kurtosis	0.77
	VIF	1.05

Sumber: Data diolah 2025

Berdasarkan Tabel 1, variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai standar deviasi sebesar 3,7013, yang mengindikasikan adanya variasi tingkat pembangunan manusia antarprovinsi di Indonesia pada kategori sedang. Nilai skewness sebesar -0,3033 menunjukkan bahwa distribusi data IPM condong ke kanan *(left-skewed)*, sehingga sebagian besar provinsi memiliki tingkat IPM yang relatif tinggi. Sementara itu, nilai kurtosis sebesar 1,3344 (<3) menandakan bahwa distribusi IPM lebih datar dibandingkan distribusi normal *(platykurtic)*, yang berarti persebaran data cukup merata tanpa banyak nilai ekstrem. Variabel belanja pendidikan BPEND memiliki nilai standar deviasi sebesar 2697004285173,30, menandakan bahwa variasi alokasi belanja pendidikan antarprovinsi relatif tinggi. Di sisi lain, variabel BPEND memperlihatkan nilai skewness dan kurtosis yang melampaui batas tersebut, mengindikasikan distribusi data yang sangat miring ke kanan *(positively skewed)* serta sangat runcing *(leptokutik)* [23]. Oleh karena itu, untuk mengatasi asimetri dan ketajaman distribusi tersebut, maka kedua variabel ditransformasikan ke dalam bentuk *logaritma natural* (ln). Transformasi ini bertujuan untuk menstabilkan varians, mengurangi skewness dan kurtosis, serta menghasilkan data yang mendekati normal, sehingga layak digunakan dalam estimasi regresi [24]. Selain itu, nilai VIF sebesar 1,54 juga mengindikasikan tidak adanya gejala multikolinearitas antarvariabel dalam model penelitian.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Selanjutnya, variabel inflasi (INF) memiliki nilai standar deviasi sebesar 1,4892, yang menggambarkan adanya perbedaan tingkat inflasi antarprovinsi yang cukup tinggi. Nilai skewness sebesar 1,0927 menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi memiliki tingkat inflasi yang relatif rendah, sementara kurtosis sebesar 0,72 (<3) mengindikasikan distribusi data yang lebih datar dari normal. Adapun variabel pertumbuhan ekonomi (PE) memiliki nilai standar deviasi sebesar 1,2152, yang menunjukkan adanya variasi tingkat pertumbuhan ekonomi antarprovinsi pada kategori sedang. Nilai skewness sebesar -0,3009 mengindikasikan bahwa distribusi data condong ke kanan (*left-skewed*), yang berarti sebagian besar provinsi memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Nilai kurtosis sebesar 0,77 (<3) menunjukkan bahwa distribusi data lebih datar dari normal dengan sebaran yang cukup merata, sedangkan nilai VIF sebesar 1,05 mengonfirmasi tidak adanya hubungan kuat antarvariabel independen. Secara keseluruhan, hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki distribusi data yang relatif normal dan tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, sehingga data memenuhi syarat untuk digunakan dalam analisis regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 2. Hasil *Fixed Effect Model (FEM)*

Fixed-effects (within) regression		Number of obs	=	217
Group variable: P		Number of groups	=	31
R-squared:		Obs per group:		
Within = 0.5045		min	=	7
Between = 0.9075		avg	=	7.0
Overall = 0.8396		max	=	7
		F(4,182)	=	46.34
corr(u_i, Xb) = 0.5851		Prob > F	=	0.0000

Variabel	Coefficient	Std.err.	t	P>t
C	45.93925	11.48017	4.00	0.000
LNBPEND	-0.878411	0.332742	-2.64	0.009
INF	0.0561791	0.05018111	1.08	0.280
PE	0.1360907	0.0804038	1.69	0.092

Sumber: Data diolah 2025, Stata17

Berdasarkan hasil estimasi model efek tetap (Fixed Efeffect Model) pada tabel sebelumnya, maka persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah sebai berikut:

IPM = 45,93925 – 0,878411 LNBPEND + 0,0561791 INF + 0,1360907 PE

Nilai konstanta sebesar 45,93925 menggambarkan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ketika seluruh variabel independen berada pada kondisi konstan. Variabel belanja pendidikan (LNBPEND) memiliki koefisien sebesar -0,878411 dengan nilai t-hitung -2,64 dan tingkat signifikansi 0,009 (<0,05), yang menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja pendidikan belum secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan manusia. Fenomena ini dapat disebabkan oleh belum optimalnya efektivitas alokasi dan pemanfaatan anggaran pendidikan di berbagai provinsi. Dengan kata lain, tingginya belanja pendidikan tidak selalu diikuti oleh peningkatan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

kualitas layanan dan hasil pendidikan, sehingga dampaknya terhadap pembangunan manusia belum maksimal. Selanjutnya, variabel inflasi (INF) dengan koefisien 0,0561791 dan tingkat signifikansi 0,280 (>0,05) memberikan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM, sehingga perubahan inflasi tidak memiliki dampak nyata terhadap kualitas pembangunan manusia. Adapun variabel pendidikan (PE) menunjukkan koefisien 0,1360907 dengan tingkat signifikansi 0,092 (<0,10), yang berarti berpengaruh positif dan signifikan pada taraf 10%. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan IPM di Indonesia.

Lebih lanjut, nilai F-hitung sebesar 46,34 dengan Prob > F = 0,0000 menandakan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan pada tingkat kepercayaan 1%. Dengan demikian, variabel , inflasi, dan pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai R^2 (within) sebesar 0,5045 menunjukkan bahwa sekitar 50,45% variasi IPM dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam model, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis Variabel

LnBPEND	PE	INF
H_0 gagal menolak	**H_0 menolak**	**H_0 gagal menolak**

Sumber: data diolah peneliti 2025, Stata 17

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada model efek tetap, diketahui bahwa variabel belanja pendidikan (LNBPEND) memiliki koefisien sebesar -0,878411 dengan nilai t hitung -2,64 dan tingkat signifikansi 0,009 (<0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan demikian, peningkatan belanja justru berpotensi menurunkan IPM, yang kemungkinan disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan anggaran pendidikan di berbagai provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran belum sepenuhnya diiringi oleh peningkatan efektivitas program dan kualitas layanan pendidikan, sehingga dampaknya terhadap pembangunan manusia belum maksimal. Selanjutnya, variabel inflasi (INF) memiliki nilai koefisien sebesar 0,0561791 dengan t hitung 1,08 dan tingkat signifikansi 0,280 (>0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM, sehingga perubahan dalam tingkat inflasi tidak memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan maupun penurunan kualitas pembangunan manusia.

Sementara itu, variabel pendidikan (PE) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,1360907 dengan t hitung 1,69 dan tingkat signifikansi 0,092 (<0,10). Temuan ini menandakan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan pada taraf 10% terhadap IPM. Artinya, peningkatan dalam tingkat pendidikan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia di Indonesia.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil estimasi model efek tetap *(Fixed Effect Model)*, variabel belanja pendidikan (LNBPEND) berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan koefisien sebesar -0,878411 dan tingkat signifikansi 0,009, yang mengindikasikan bahwa peningkatan anggaran pendidikan pada periode penelitian diduga belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia, kemungkinan akibat adanya inefisiensi, salah sasaran, atau lemahnya tata kelola anggaran. mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi anggaran pendidikan belum secara otomatis meningkatkan IPM. Hasil tersebut mengkonfirmasi bahwa efektivitas belanja pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor struktural dan kelembagaan, bukan semata-mata oleh besaran anggaran yang dialokasikan. Sebagaimana ditegaskan oleh [25], alokasi belanja publik di sektor pendidikan pada negara berkembang seringkali belum efektif karena di dominasi oleh belanja birokrasi, rendahnya tingkat akuntabilitas, serta mekanisme evaluasi berbasis kinerja yang lemah Temuan ini menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi alokasi dan distribusi pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam teori peran pemerintah Musgrave [15].

Di sisi lain, variabel inflasi (INF) memiliki koefisien positif sebesar 0,0561791 dengan signifikansi 0,280 yang menunjukkan bahwa pengaruh inflasi terhadap IPM tidak signifikan secara statistik, sehingga fluktuasi inflasi selama periode penelitian belum berdampak nyata terhadap pembangunan manusia, sejalan dengan fungsi stabilisasi Musgrave yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga.

Sementara itu, variabel pertumbuhan ekonomi (PE) memiliki pengaruh positif dan signifikan pada tingkat 10% dengan koefisien sebesar 0,1360907 dan signifikansi 0,092. Hasil ini selaras dengan teori Human Capital [21], yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dipicu oleh peningkatan produktivitas sumber daya manusia melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam mendorong IPM, meskipun diperlukan kebijakan pendukung untuk memastikan manfaatnya terdistribusi secara merata.

Secara keseluruhan, model regresi menunjukkan signifikansi dengan nilai F-hitung 46,34 dan Prob > F = 0,0000, yang menandakan bahwa variabel belanja pendidikan (LNBPEND), inflasi, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Nilai R^2 (within) sebesar 0,5045 mengindikasikan bahwa sekitar 50,45% variasi IPM dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti layanan kesehatan, pendidikan, serta kebijakan sosial yang tidak tercakup dalam model.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis empiris menggunakan model efek tetap (Fixed Effect Model) pada data panel periode 2016–2023, penelitian ini menyimpulkan beberapa temuan kunci terkait determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Pertama, variabel belanja pendidikan menunjukan bahwa peningkatan alokasi anggaran pendidikan belum mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara efektif. Kondisi ini disebabkan oleh inefisiensi penyerapan anggaran, dominasi belanja rutin dibanding belanja modal strategis, serta kesenjangan infrastruktur pendidikan antarwilayah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi belanja pendidikan tidak serta-merta berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan manusia. Hal ini merefleksikan adanya permasalahan struktural dalam efektivitas penggunaan anggaran, di mana peningkatan belanja belum diikuti oleh peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan. Implikasinya, meskipun pemerintah telah

meningkatkan alokasi dana pendidikan, namun tanpa diiringi dengan tata kelola, distribusi, dan pemanfaatan anggaran yang efisien, maka dampak positifnya terhadap pembangunan manusia akan tetap terbatas [15], [20], [25]. Kedua, inflasi (INF) tidak memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam konteks periode penelitian, stabilitas harga relatif terjaga sehingga tidak menjadi faktor penghambat utama dalam pembangunan manusia. Namun, temuan ini tidak mengabaikan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi sebagai prasyarat jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, pertumbuhan ekonomi (PE) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sekalipun pada tingkat signifikansi 10%. Hasil ini menegaskan proposisi teori Human Capital bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menciptakan kondisi yang memungkinkan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, yang pada gilirannya mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, model yang digunakan signifikan dengan nilai F-statistik sebesar 46,34, yang mengonfirmasi bahwa ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap IPM. Nilai R^2 (within) sebesar 0,5045 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 50,45% variasi IPM, sementara sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model, seperti kualitas layanan publik, infrastruktur sosial, dan variabel kelembagaan. Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkuat teori peran pemerintah [22] dan teori Human Capital Becker [21] dalam konteks Indonesia. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya fungsi distribusi dan alokasi pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan belanja pendidikan, agar alokasi anggaran tersebut benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan belanja publik, terutama di sektor pendidikan, menjadi faktor kunci dalam memperkuat hubungan positif antara kebijakan fiskal dan peningkatan pembangunan manusia di Indonesia. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tetap menjadi penggerak utama, namun harus diimbangi dengan kebijakan yang memastikan pemerataan akses dan hasil pembangunan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan IPM di Indonesia memerlukan pendekatan kebijakan ganda (*twin-track policy*), yaitu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat instrumen redistribusi dan pemerataan agar pembangunan manusia dapat berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

Daftar Pustaka

[1] F. Arif Budiyanto, “Assessing the Impact of Human Development Index Components on Economic Growth: A Case Study of the Special Region of Yogyakarta,” *J. Reg. Econ. Indones.*, vol. 5, no. 2, pp. 162–176, 2024, [Online]. Available: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/

[2] A. M. Gai, M. M. Sir, M. A. Paru, and P. Aryunto, “The Influence of Economic Growth, Human Development Index, and Open Unemployment Rate on Poverty Levels in Sumenep Regency,” *Indones. Interdiscip. J. Sharia Econ.*, vol. 8, no. 2, pp. 3862–3882, 2025.

[3] BPS, “Indeks Pembangunan Manusia 2023,” Badan Pusat Statistik.

[4] S. N. Sholati, E. Setyowati, and M. I. Hasmarin, “Determinan Pertumbuhan Ekonomi di 6 Negara ASEAN Tahun 2018-2022,” *Economos*, vol. 8, no. 3, pp. 333–344, 2024.

[5] M. S. Siatan, S. Gustiyana, and S. Nurfitriani, "Infrastructure Development and Regional Disparities," *KnE Soc. Sci.*, vol. 2024, pp. 799–806, 2024, doi: 10.18502/kss.v9i16.16289.

[6] J. B. Maharda and B. Z. Aulia, "Government Expenditure and Human Development in Indonesia," *Jambura Equilib. J.*, vol. 2, no. 2, pp. 81–94, 2020, doi: 10.37479/jej.v2i2.6901.

[7] D. Nurvita, S. Rohima, A. Bashir, and M. Mardalena, "The Role of Public Spending on Education, Health, and Economic Growth toward Human Development Index in the Local Economy," *Sriwij. Int. J. Dyn. Econ. Bus.*, vol. 6, no. June, pp. 197–210, 2022, doi: 10.29259/sijdeb.v6i2.197-210.

[8] P. Andiny and M. G. P. Sari, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Langsa," *J. Samudra Ekon.*, vol. Vol. 2, no. 2, pp. 116–125, 2018, [Online]. Available: http://scholar.unand.ac.id/39279/

[9] Jatmiko Wahyu Nugroho, Nurjanna Ladjin, Erwin Agus, Suwardi Zakaria, and Iwan Harsono, "Determinants of Eastern Indonesia's Human Development Index," *J. Econ. Educ. Entrep. Stud.*, vol. 5, no. 2, pp. 175–182, 2024, doi: 10.62794/je3s.v5i2.2457.

[10] I. Republik, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV)*. 2002.

[11] Bappenas, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 Buku III: Agenda Pembangunan Wilayah," *Buku III Agenda Pembang. Wil.*, pp. 2015–2019, 2015.

[12] Bappenas, "Laporan Kinerja Kementerian Bappenas," p. 174, 2025, [Online]. Available: https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Dokumen 2025/Konten/LKJ KEMENTERIAN TAHUN 2024.pdf

[13] Kemenkeu, *APBN Kita: Realisasi Belanja Pendidikan Tahun 2023*. 2023. [Online]. Available: https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/be27c9e1-082c-4000-b795-ffe76296c191/APBN-KiTa-Desember-2024.pdf?ext=.pdf

[14] OECD, *PISA 2022 Results The State of Learning and Equity in education*, vol. I. 2022.

[15] S. Dwiputrianti, S. Yosephine, L. Situngkir, and G. Lele, "Strategic government spending and human development in Papua , District-Level panel evidence , 2018 – 2022," *Cogent Soc. Sci.*, vol. 11, no. 1, p., 2025, doi: 10.1080/23311886.2025.2582221.

[16] T. Lorato, T. Beyene, and T. Tadesse, "Unintended structural transformation and growth in Ethiopia : An autoregressive distributed lag (ARDL) model approach," *J. Innov. Entrep.*, 2025, doi: 10.1186/s13731-025-00498-5.

[17] W. N. Bandura and T. L. A. Leshoro, "Inflation and Financial Development in Sub-Saharan Africa," *Econ. Ann.*, vol. 67, no. 233, pp. 85–112, 2022, doi: 10.2298/EKA2233085B.

[18] BPS, "Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2022," no. 01, 2023, [Online]. Available: https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/01/02/1949/inflasi-year-on-year--y-

on-y--pada-desember-2022-sebesar-5-51-persen--inflasi-tertinggi-terjadi-di-kotabaru-sebesar-8-65-persen-.html

[19] T. Bilal, C. Muhammad Irfan, and A. Dilshad, "IMPACT OF HEALTH EXPENDITURES ON SOCIAL WELFARE AND ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES Vehari Campus , Pakistan * Corresponding Author : Muhammad Irfan Chani," vol. 03, no. 04, pp. 717–725, 2025.

[20] I. Idris, H. Rozaq, T. Kurniawati, and A. Rahim, "Growth limits and ecological capacity in developing countries," no. December, 2025.

[21] G. Becker, *Investment in Human Capital: Effects on Earnings*, vol. 2. 1964.

[22] R. A. Musgrave and A. T. Peacock, "Classics in the theory of public fiance," p. 132, 1967.

[23] P. Ananta, M. E. bin M. Kamal, and N. Mohamed, "Public Spending, Corruption, and Human Development: Empirical Evidence in Middle-Income Countries," *Proc. Int. Conf. Technol. Humanit. Manag. (ICTHM 2023), 12-13 June, 2023, Istanbul, Turkey*, vol. 131, pp. 561–579, 2023, doi: 10.15405/epsbs.2023.11.48.

[24] K. Benoit, "Linear Regression Models with Logarithmic Transformations," pp. 1–8, 2011.

[25] A. M. Muhammad and B. Presnanda, "IMPROVING HUMAN DEVELOPMENT IN ASIA: DO GOVERNMENT EXPENDITURE AND GOOD GOVERNANCE MATTER?," 2018.